

LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM, DAN PERUM LKBN ANTARA)

- Rapat ke : 13
Masa Persidangan : III
Tahun Sidang : 2020 – 2021
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers secara fisik dan virtual
- Hari, Tanggal : Senin, 1 Februari 2021
Pukul : 14.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Sartomo, S.S., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt.1, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : 1. Evaluasi pencapaian kinerja KPI Pusat, KIP, dan Dewan Pers Tahun 2020;
2. Realisasi Anggaran KPI Pusat, KIP, dan Dewan Pers TA. 2020;
3. Persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN Tahun 2021;
4. Isu-isu aktual, antara lain mengenai:
a. KPI Pusat
1) Laporan perkembangan penyusunan revisi P3SPS;
2) Pengawasan KPI terkait pelaksanaan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 pada Lembaga Penyiaran;
3) Langkah strategis KPI terkait persiapan digitalisasi pasca UU Cipta Kerja.
b. KIP
1) Laporan perkembangan penyusunan Standar Layanan Informasi Publik termasuk Materi Legal Standing Wartawan dan Advokat sebagai Pemohon Informasi Publik dan Pemohon Sengketa Informasi Publik;

- 2) Laporan perkembangan penyelesaian sengketa Informasi KI Pusat sekaligus topik sengketa informasi yang paling sering terjadi hingga akhir tahun 2020;
- 3) Langkah Strategis KIP terhadap Keterbukaan Informasi Publik sebagai Modal Pemerintahan Digital Indonesia

c. Dewan Pers

- 1) Laporan perkembangan terkait upaya perlindungan tugas pers dan penguatan kualitas perusahaan pers;
- 2) Laporan perkembangan terkait pelaksanaan Protokol Kesehatan oleh Jurnalis di Masa Pandemi Covid-19;
- 3) Tanggapan Dewan Pers soal Keputusan KI Pusat terkait Legal Standing Wartawan sebagai Pemohon Informasi Publik dan Pemohon Sengketa Informasi Publik.

Hadir : 1. ... orang dari 52 Anggota Komisi I DPR RI
2. a. Ketua KPI Pusat, Agung Suprio;
b. Ketua KIP, Gede Narayana;
c. Wakil Ketua Dewan Pers, Hendri CH Bangun;
beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 15.21 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. RDP Komisi I DPR RI dengan KPI Pusat, KIP, dan Dewan Pers secara fisik dan virtual pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Ketua KPI Pusat, Ketua KI Pusat dan Wakil Ketua Dewan Pers terkait:
 - a. Evaluasi pencapaian program kerja TA 2020
 - b. Realisasi anggaran TA 2020
 - c. Rencana program kerja
 - d. Isu-isu aktual terkait

Sehubungan dengan penjelasan tersebut, Komisi I DPR RI mengapresiasi capaian kinerja KPI Pusat, KI Pusat dan Dewan Pers TA 2020 dan mendorong agar pencapaian kinerja tersebut terus ditingkatkan di Tahun 2021.

2. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan anggaran sebagai berikut:
 - a. KPI Pusat dengan total Pagu Anggaran 2021 sebesar Rp. 59.172.617.000,- (lima puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah).
 - b. KI Pusat dengan total Pagu Anggaran 2021 sebesar Rp34.389.809.000,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).
 - c. Dewan Pers dengan total Pagu Anggaran 2021 sebesar Rp35.614.034.000,- (tiga puluh lima miliar enam ratus empat belas juta tiga puluh empat ribu rupiah).

Selanjutnya, Komisi I DPR RI mendorong KPI Pusat, KI Pusat dan Dewan Pers untuk mengimplementasikan APBN TA 2021 secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

3. Komisi I DPR RI mendorong KPI Pusat, KI Pusat dan Dewan Pers untuk, melakukan hal-hal berikut:
 - a. KPI Pusat
 - 1) Menuntaskan revisi P3SPS, paling lambat pertengahan tahun 2021;
 - 2) Memaksimalkan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19 pada lembaga penyiaran; dan,
 - 3) Melakukan langkah strategis secara berkesinambungan agar *Analog Swicth Off* (ASO) pasca UU tentang Cipta Kerja dapat berjalan dengan baik.
 - b. KI Pusat
 - 1) Menerapkan Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) sebagai upaya peningkatan kualitas layanan informasi pada masyarakat;
 - 2) Meningkatkan penyelesaian sengketa informasi publik secara lebih optimal; dan,
 - 3) Melakukan langkah strategis terkait keterbukaan informasi publik sebagai modal pemerintahan digital Indonesia.
 - c. Dewan Pers
 - 1) Melakukan upaya perlindungan tugas pers dan penguatan kualitas Perusahaan Pers secara lebih optimal; dan,
 - 2) Melakukan langkah strategis terkait penguatan Pers Nasional untuk tetap bertahan menghadapi krisis di masa Pandemi Covid-19.

4. Komisi I DPR RI mendukung langkah KPI Pusat, KI Pusat dan Dewan Pers agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing secara optimal, optimis dan berkelanjutan pada TA 2021.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.23 WIB.

Jakarta, 1 Februari 2021
KETUA RAPAT,

1. **KPI PUSAT
KETUA,**

AGUNG SUPRIO

DR. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI
A-442

2. **KOMISI INFORMASI PUSAT
KETUA,**

GEDE NARAYANA

3. **DEWAN PERS
WAKIL KETUA,**

HENDRY CH BANGUN

